KEKERASAN SEBAGAI FENOMENA BUDAYA: SUATU PELACAKAN TERHADAP AKAR KEKERASAN DI INDONESIA

Oleh: Arinto Nurcahyono[*]
Email: artnur@gmail.com

Abstrak

Kekerasan secara umum dipahami sebagai tindakan, perilaku, atau keadaan sosial yang mengakibatkan orang atau kelompok lain menderita, sengsara, terluka, bahkan menggal dunia, selalu dipandang sebagai tindakan atau perbuatan tidak bermoral, tidak tidak manusiawi, dan merusak basis kehidupan manusia. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kekerasan itu sesuatu yang inheren ataukah bersifat struktural. Tulisan ini akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut dengan melacak akar kekerasan di Indonesia melalui catatan sejarah kekerasan pada era pra kolonial.

A. Pendahuluan

Kekerasan merupakan fenomena universal karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Usianya adalah setua sejarah dan peradaban. Pendek kata, kekerasan sudah dikenal, dipraktekkan dan ditumbuhkembangkan oleh manusia dalam setiap ruang, waktu, tahap dan kategori. Pengalaman dan memori masa lampau dan sekarang manusia dijejali secara berlimpah ruah oleh sikap, aksi dan tindakan kekerasan. Tidak seorang dan tidak satu komunitas pun luput dari aksi kekerasan dalam pelbagai bentuk dan manifestasinya. Kekerasan sedemikian luas dan kompleks sehingga amat sulit merangkum luas cakupan, pengertian, jenis, jumlah dan kualitas secara singkat.

Sebenarnya sebelum fenomena globalisasi di bidang ekonomi dan perdagangan, sikap dan tindak kekerasan sudah merupakan gejala mondial. Peristiwa, berita, karya sastra, film. Dan berbagai media komunikasi massa makin didominasi oleh tema-tema kekerasan. Karena itu kecenderungan itu berlangsung secara terus menerus dan setiap saat maka manusia menjadi tidak peka bahkan menjadi mati rasa terhadap gejala kekerasan. Menganggap kekerasan sebagai kewajaran harus dilihat sebagai krisis sosial, krisis kemanusiaan, dan krisis

[*] Alumni Pasca Sarjana Filsafat UGM, Staf Pengajar Fakultas Hukum UNISBA

spiritual. Lebih jauh kekerasan itu bahkan diciptakan, diprovokasi, dikomersialisasikan, dan "dibudayakan" sehingga akhirnya terwujudlah budaya kekerasan atau budaya yang menghasilkan kekerasan.[1]

Konsep dan istilah budaya kekerasan merupakan konsekuensi makin luas, dalam, dan kompleksnya jenis, jumlah, dan mutu kekerasan yang dianggap bersifat hirarkis, mendasar dan "menular'.[2] Berbagai alat, metode, dan alasan pembenaran dicari untuk melegitimasikan tindak kekerasan . Bahkan lembaga-lembaga politik telah mensahkan dan melembagakan kekrasan sebagai alat pemeliharaan tertib sosial (*order*). Inilah yang menghasilkan apa yang disebut sebagai kekerasan struktural, yaitu kekerasan yang digunakan oleh struktur kekuasaan yang dapat berupa aparat, tentara, pemerintah, dan atau birokrasi .[3] Peradaban moderen memang secara *de jure* dan *de facto* memberi wewenang kepada negara sebagai satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi melakukan kekerasan. Padahal kekerasan adalah tetap kekerasan yang memiliki unsur pemaksaan, destruksi, dan pengingkaran sebagian atau seluruh kebebasan, dan tidak menjadi soal siapa pelakunya.

Kekerasan yang makin luas dan kompleks itu juga sasrat dengan berbagai paradoks. Kekerasan itu dibenci, tetapi juga dipuja[4]. Tidak seorangpun menghendaki kekerasan, bahkan sebaliknya semua menginginkan kekerasan itu diakhiri dengan segera dan tanpa syarat, tetapi kekerasan tidak pernah dapat dijinakkan. Kekerasan menghasilkan efek demonstratif berupa reaksi kekerasan yang beruntun. Gerakan dan aksi anti kekerasan sekalipun seringkali tergelincir menjadi gerakan dan aksi kekerasan. Preseden gerakan dan aksi tanpa kekerasan (*non violence* atau ahmisa) yang dilakukan Mahatma Gandhi tidak banyak ditiru secara sukses oleh tokoh-tokoh lain pada waktu dan tempat yang berbeda. Kekerasan makin menjadi lingkaran setan, mengikat, dan kian inheren dengan setiap perilaku manusia, komunitas, dan bangsa-bangsa. Pada taraf ini kekerasan

---

[1] Bandingkan dengan Julia L.Suryakusuma, "Budaya Kekerasan, atau Budaya yang Menghasilkan Kekerasan" dalam *Kompas*, 1 Mei 1998, hal. 4.
[2] *Ibid*
[3] Lihat Mudji Sutrisno, "Kekerasan Struktural", dalam Kompas, 8 Juli 1997, hal. 4.
[4] Lihat Mudji Sutrisno,"Kekerasan:antara Dibenci dan Dipuja",dalam *Kompas*, 18 Agustus 1996, hal. 13.

terlihat sebagai suatu perilaku sistemik dengan implementasi struktur dan kelembagaannya. Alhasil umat manusia seolah-olah tidak mampu melepaskan diri dari tindak kekerasan bahkan dianggap sebagai suatu keharusan atau sebagai pilihan tanpa alternatif.[5]

1. Perumusan Masalah

Tulisan ini pada bagian pertama-tama mencoba mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan kekerasan, dengan mengemukakan beberapa teori-teori tentang kekerasan. Setelah menjabarkan wacana teoritis kemudian masuk arena realitas dengan mengacu pada catatan-catatan sejarah tentang kekerasan di Indonesia. Sebagai upaya pelacakan akar kekerasan di Indonesia maka dikemukakan data historis dengan mengacu pada catatan-catatan orang-orang Eropa tentang kekerasan di Indonesia di masa pra-kolonial.

2. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Pertanyaan sentral yang hendak diuraikan pemecahannya dalam tulisan ini adalah apakah suatu tindakan kekerasan termasuk aksi kekerasan kolektif, ditentukan oleh individu secara otonom atau ditentukan oleh struktur dalam pengertian nilai, budaya, ekonomi maupun politik? Tulisan ini merupakan kajian teoritis, karenanya meskipun disertai contoh-contoh empiris, sifatnya tetap analitik. Namun demikian tulisan ini diharapkan tidak hanya memiliki makna secara teoritis, tetapi juga memiliki arti secara praktis, khususnya untuk menyadarkan kita agar selalu tanggap (*aware*) terhadap keberadaan kekerasan di dalam struktur budaya kita. Dengan kesadaran bersama yang demikian,lebih lanjut diharapkan kita secara kolektif mampu memberdayakan diri melakukan kritik terhadap justifikasi kekerasan dan mendelegitimasi kekerasan agar tidak merajalela di masyarakat.

B. Tinjauan Pustaka

Yang dimaksud “kekerasan” di sini adalah yang biasa diterjemahkan dari *violence*. *Violence* berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “*vis*” (daya kekuatan) dan “*latus*” (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian berarti

---

[5] Bandingkan Israel W. Charny (ed), *Strategies Against Violence: Design For Nonviolen Change*,(Boulder, Colorado: Westview Press, Inc., 1978). Et passim.

membawa kekuatan.[6] Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai 'sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan'. Sedangkan "paksaan" berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata "memperkosa" yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan. Dalam *New Oxford Dictionary* kekerasan didefinisikan sebagai "*behaviour involving physical force intended to hurt, damage, or kill someone or something*".

R. Audi merumuskan "*violence*" sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.[7]Lalu, apakah kekerasan pada dirinya sendiri merupakan sesuatu yang alamiah atau tidak ? Dua filsuf besar, Thomas Hobbes(1588) dan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) mempunyai pandangan tentang "kekerasan" yang bertentangan satu sama lain. Menurut Hobbes, kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia (*state of nature*) dan hanya suatu pemerintahan negara yang menggunakan kekerasan terpusat dan memiliki kekuatanlah (*Leviatan*)[8] yang dapat mengatasi keadaan ini. Hal ini tentu saja mendasarkan diri pada anggapan Hobbes tentang manusia :makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irrasional dan anarkistis serta mekanistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat,buas, pendek pikir. Inilah sosok *homo homini lupus,* manusia adalah serigala bagi yang lain dan akibatnya perang semua lawan semua (*belum omnium contra omnes*). Sebaliknya Rousseau mempunyai anggapan bahwa manusia dalam keadaan alamiahnya sebagai ciptaan yang polos, mencintai diri secara spontan , tidakegois dan tidak altruis.[9] Hanya rantai peradabanlah yang telah membentuk manusia menjadi binatang yang

---

[6] Bandingkan Newton Garver, "What violence is"?, dalam: *Philosophy for a New Generation*, diterbitkan oleh A.K. Bierman dan J. Gould, New York, 1970, hal. 349-370. Juga bandingkan J.G.Davis, *Christian, Politics and Violence Revolution*, New York, 1976, hal. 127-137.

[7] Robert Audi, "The Justification of Violence" dalam *Philosophy for a New Generation*, hal.371-379.

[8] Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 200-207.

[9] Ibid., hal 238. Bdk. Mochtar Lubis (ed), Menggapai Menuju Dunia Damai, hal. 43.

memiliki sifat menyerang seperti keadaannya saat ini. Jadi, kalau Hobbes beranggapan bahwa kekerasan ada sejak semula dalam diri manusia, Rousseau justru menolak anggapan ini dan berpendapat bahwa kemajuan, peradabanlah yang membuat manusia melakukan tindakan kekerasan.

C. Pembahasan

1. Identifikasi Teoritis Tentang Kekerasan

Dalam tataran teoritis muncul pertanyaan yang substansial, apakah suatu tindakan kekerasan termasuk aksi kekerasan kolektif, ditentukan oleh individu secara otonom atau ditentukan oleh struktur dalam pengertian nilai, budaya, ekonomi maupun politik. Dalam perdebatan teoritis, muncul dua pandangan yang menyebutkan, apakah suatu kekerasan itu diletakkan dalam tataran agen atau struktur.

Dalam tataran agen, kekerasan dipahami sebagai suatu tindakan individu yang dilakukan secara sadar dan sengaja memproduksi dan mentransformasikan realitas sosial. Para pelaku dipahami sebagai individu yang relatif otonom melakukan tindakan, dan aksi kekerasan kolektif dipahami sebagai produk pilihan rasional seseorang. Karena itu, penjelasan terhadap kekerasan kolektif selalu dilihat dari "faktor-faktor dalam" para pelaku kekerasan dan mengabaikan faktor dan kendala struktural serta proses sosial lainnya. Beberapa penjelasan teoritis yang diturunkan dan kerangka analisis agen ini antara lain dilakukan oleh Rule ketika menjelaskan perilaku/aksi kolektif.[10] Dan Berk ketika menggunakan pendekatan permainan untuk menjelaskan kerusuhan massa.[11]

Sebaliknya dalam tataran struktur, kekerasan dipahami sebagi hasil proses hubungan-hubungan sosial atau struktur di mana para pelaku tersebut berada. Nilai dan norma dipandang sebagai "imperatif struktural" yang terinternalisasi dalam diri individu, sehingga orang berperilaku selaras dengan – atau fungsional

---

[10] Muhammad Asfar, "Kekerasan Politik dan Demokrasi: Analisis terhadap Kekerasan Politik di Seputar Pemilu 1997", dalam *Prisma* Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial, No.1 1998, LP3ES, Jakarta, hal. 21. dikutip dari James Rule, *Theory of Civil Violence*, Barkeley: University of California Press, 1988, hal 170-179.

[11] Ibid, dikutip dari Richard A. Berk, A Gaming Approach to Crowd Behavior," dalam L.E. Genevie (eds), Collective Behavior and Social Movement, Ithaca, IL: Peacock and Breach, 2994, hal 25-34.

terhadap sitem. Karena itu, penjelasan terhadap kekerasan kolektif selalu dilihat dari "faktor-faktor luar" para pelaku kekerasan dan mengabaikan faktor-faktor minat motivasi, dan strategi. Tindakan agen dalam bentuk kekerasan kolektif) dianggap tidak lebih dari artefak atau produk struktur.[12]

Seacara ontologis persoalan agen dan struktur pada dasarnya mempertanyakan sejauhmana tindakan-tindakan individu merupakan proses sosialisasi dan produk struktur yang hanya dapat dikontrol secara minimal, dan sejauhmana tindakan-tindakan tersebut merupakan produk pilihan rasional yang sengaja diambil oleh individu sebagai subjek yang otonom. Secara epistemologis persoalan agen dan struktur pada dasarnya berkisar pada upaya untuk menjelaskan suatu efek peristiwa tertentu sebagai konsekuensi tindakan dari struktur dan hubungan-hubungan sosial di mana para aktor tersebut berada.

Yang menjadi persoalan tindakan seseorang sering sulit diidentifikasi dan ditempatkan dalam tataran agen atau struktur. Penjelasan teoritis dalam tataran agen seringkali voluntaristik dan cenderung menempatkan individu sebagai subjek yang membentuk dan mengubah struktur, seolah-olah individu hidup dalam kevakuman sosial. Sebaliknya, penjelasan teoritis yang menempatkan struktur sebagai faktor penjelas umumnya terlalu deterministik dan cenderung menempatkan individu hanya seperti robot yang tidak mempunyai kehendak bebas.

Untuk itu Anthony Giddens "memadukan" kedua cara pandang tersebut. Bagi Giddens, struktur tidak hanya menimbulkan kendala bagi tindakan manusia, tetapi ia juga dapat menciptakan peluang melakukan tindakan secara otonom. Giddens menawarkan kerangka konseptual/teori strukturisasi. Teori strukturisasi pada dasarnya mengandung empat perangkat konsep, yaitu dualisme struktural, dualisme subjek-objek, dimensi ruang dan wakti, dan pemahaman ganda (*double hermeneutik*).[13]

Dualisme struktur pada dasarnya memandang bahwa struktur dan individu-aktor (agen) berinteraksi dalam proses produk dan reproduksi institusi serta

---

[12] Ibid.

[13] Lihat Ramlan Surbakti, Pemilihan pada Pemilu 1992, antara Kendala dan Peluang" makalah disampaikan pada Seminar Nasional IX AIPI, Surabaya, 6-8 Agustus 1992.

hubungan sosial. Artinya agen merupakan hasil struktur tetapi pada saat yang sama agen tersebut juga menjadi mediasi bagi pembentukan struktur baru. Individu atau agen tidak hanya sekedar penanggung beban – dan selalu menyesuaikan dengan – struktur, tetapi juga memiliki pengetahuan mengenai realitas dan berdasarkan pemahaman itu ia bertindak untuk mengubah realitas disekelilingnya.

Perangkat konsep yang kedua adalah dualisme subjek-objek. Dualisme subjek-objek ini pada dasarnya menyangkut orientasi agen atau individu-individu terhadap struktur, yang dapat dibedakan menjadi tiga. *Pertama*, orientasi rutin praktis, para aktor yang secara psikologis hanya mencari rasa aman. Mereka hanya berperan sebagai medium memproduksi struktur belaka, sama sekali tidak ada upaya mempersoalkan apalagi mengubah struktur yang telah ada. Kedua, orientasi teoritik, yaitu para aktor yang memiliki kemampuan memelihara jarak dengan struktur sehingga ia memiliki pemahaman yang jelas terhadap struktur dan mampu merespon apa yang diciptakan struktur kepadanya. Ketiga, orientasi strategik pemantauan , yakni para aktor yang tidak hanya mampu menjaga jarak tetapi juga berkepentingan terhadap apa yang dilahirkan struktur, sehingga mereka dapat menanggapi struktur. Hanya pada kelompok kedua dan ketiga yang cenderung melahirkan dualisme subjek objek.

Perangkat konsep ketiga adalah dimensi ruang dan waktu. Artinya, setiap institusi dan hubungan-hubungan sosial berlagsung dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Interaksi sosial tidak hanya berlangsung di dalam – dan dibentuk oleh – ruang dan waktu sebagai lingkungan eksternal, tetapi juga menjadi internal bagi hubungan-hubungan sosial karena telah memberi makna sosial bagi interaksi tersebut.

Perangkat konsep keempat pada dasarnya menyangkut tentang metode untuk mengungkapkan interaksi antara struktur dan agen dalam dimensi ruang dan waktu, yaitu metode pemahaman ganda, yakni pemahaman ganda, yakni, pemahaman ilmu tentang realitas (*the second order understanding*) dan realitas yang dipahami oleh awam (*the first order understanding*). Jika aliran positivis memandang kalangan awam sebagai objek pengetahuan, teori ini menganggap

awam sebagai objek dan subjek sekaligus. Kalangan awam dipandang memiliki kemampuan memahami realitas sekeliling sekaligus mampu menggunakan pemahaman tersebut untuk bertindak.

Dalam perspektif yang berbeda, Hannah Arendt, filsuf politik dari Harvard University memunculkan masalah kekerasan sebagai bidang kajian yang lebih luas. Dalam bukunya, *On Violence* (1970), Hannah Arendt melontarkan pandangan sangat menggelitik bahwa sebagai perwujudan dari kekuatan (*force*) yang pada prinsipnya hanya sebuah instrumen atau sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kekerasan (*violence*) pada dasarnya tidak bisa legitimate, ia hanya bisa justified di di dalam masyarakat. Kekerasan secara moral dan normatif selalu problematik dan tidak pernah bisa diterima sepenuhnya oleh anggota masyarakat. “Kekerasan secara alamiah memiliki sifat instrumental. Seperti semua sarana, ia selalu memerlukan arahan dan justifikasi melalui tujuan yang dikejarnya”, demikian Arendt berpendapat.[14]Karena sifatnya demikian itu maka kekerasan selamanya tidak akan pernah menjadi sumber dan basis kekuasaan (*power*). Bahkan sebaliknya, kekerasan justru merusak dan menghancurkan kekuasaan karena keduanya mempunyai basis yang berbeda. “Kekuasaan tidak membutuhkan justifikasi, yang dibutuhkan adalah legitimasi”, demikian kata Arendt.[15]Pandangan ini membutuhkan diskusi luasuntuk membedakan antara kekuasaan dan kekerasan, dan antara legitimasi dan justifikasi sebagai dua hal yang berbeda. Pandangan Arendt tersebut merupakan sebuah pemikiran baru tentang justifikasi dan legitimasi kekerasan yang sangat berbeda dengan apa yang dipahami ilmuwan sosial secara umum. Untuk memahami hal itu, sedikit dibahas pandangan Arendt tentang masalah ini. Pandangan Arendt ini pada dasarnya, melihat kedudukan kekerasan yang paradoksal di dalam struktur budaya masyarakat. Dalam hal ini Arendt termasuk yang percaya sepenuhnya bahwa kekerasan tidak pernah mendapat dukungan sosial dan moral sempurna dari masyarakat alias tidak pernah legitimate. Arendt melihat kekuasaan selalu berbasis pada konsensus nilai bersama. “Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan

---

[14]Hannah Arendt, *On Violence*,(London): Allen Lane the Penguin, 1970), hal.50-52.
[15] Ibid., hal.44.

manusia bukan hanya bertindak, tetapi tetapi bertindak secara bersama (*in concert*). Kekuasaan tidak pernah menjadi milik individual, ia milik kolektif dan tetap berada dalam keberadaannya sepanjang kelompok menjalin hidup bersama".[16]Arendt pada esensinya melihat kekuasaan berbasis pada tindakan komunikasi bersama. "Ketika kita mengatakan seseorang berada dalam kekuasaan (*in power*), kita sebenarnya mengatakan bahwa seseorang tersebut diberdayakan (*empowered*) oleh sejumlah orang atas nama mereka".[17]Pendapat Arendt itu berbeda dengan konsepsi ilmuwan sosial umumnya bahwa kekuasaan sepenuhnya dapat dikendalikan seseorang dengan melakukan dominasi atas sejumlah orang lainnya. Konsepsi kekuasaan demikian memberi ruang adanya kesamaan antara kekuasaan dan kekerasan, atau kekerasan bisa menjadi basis kekuasaan, sebagaimana diyakini arus utama pemikiran dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya penganut teori Marxian dan Weberian. Dalam pandangan mereka secara umum kekuasaan dapat diterima sebagai organisasi atau pelembagaan kekerasan. "Kekuasaan bisa tumbuh dari laras senjata" (*power is supposed to grow out of the barrel of the gun*), demikian sering kita dengar. Atau dalam kata-kata C. Wright Mills, "semua poltik adalah perjuangan kekuasaan; bentuk puncak dari kekuasaan adalah kekerasan"(*all politics is struggle for power; the ultimate kind of power is violence*).[18]Demikian itu berarti kekuasaan dipahami bisa memiliki kesamaan dengan kekerasan, yaitu sebagai dominasi orang terhadap sejumlah orang lain, atau ketundukan orang lain terhadap orang lain, dengan cara kekerasan. Arendt dengan tegas menolak konsepsi tersebut. Kekuasaan, sebagai pemberdayaan kolektif yang terbentuk melalui tindakan komunikasi, bisa tanpa kekerasan. Sebaliknya, kekerasan dapat hidup terpisah tanpa kekuasaan, yaitu ketika hanya sebagai kasus kekuatan sangat terbatas sebagai kasus individual. Bahwa Arendt melihat kekerasan dapat merusak kekuasaan, dan sebaliknya tidak dapat menciptakannya. "Kekerasan selalu merusak kekuasaan; keluar dari laras senjata tumbuh komando paling efektif, menghasilkan kepatuhan paling sempurna....apa yang tidak pernah tumbuh darinya adalah kekuasaan" (*violence can always*

---

[16] Ibid., hal. 44.
[17] C.Wright Mills, *The Power Elite* (New York:1956), hal. 171.
[18] Hannah Arendt, Opcit.hal. 53.

destroy power; out of the barrel of a gun growth the most effective command, resulting in the most instance and perfect obedience....What never can grow out it is power).[19]Dengan itu, Arendt melihat kekuasaan tidak pernah bisa legitimate, melainkan hanya *justified*. Secara jelas di sini Arendt membedakan antara justifikasi dan legitimasi kekerasan. Baginya, kekerasan hanyalah sebuah alat (*instrument*) sebagai bagian dari kekuatan (*force*), yang penggunaannya dapat melipatgandakan kekuatan manusia. Ia tidak pernah menjadi sistem nilai yang menjadi basis kekuasaan kolektif bersama. Sekali ia digunakan, ia memerlukan justifikasi, rasionalisasi, dan pembenaran normatif bersama secara kolektif. Dalam pandangan Arendt, kekuasaan tidak membutuhkan justifikasi, yang dibutuhkannya adalah legitimasi. Kekuasaan berkembang ketika orang menjalin bersama dan bertindak bersama. Ia memperoleh legitimasi dari tindakan kolektif bersama itu, daripada dari tindakan yang mengikutinya. Sebaliknya kekerasan dapat terjustifikasi, namun tidak terlegitimasi. Kekerasan sebagai sarana selalu ditolak, dan penggunaannya hanya akan efektif mencapai tujuan bila hal itu memiliki justifikasi.[20]

2. Kekerasan di Indonesia di Masa Pra-Kolonial

Dalam konteks kekerasan di Indonesia, teori tentang agen dan sturtur ini dapat dijadikan landasan teoritis ketika berhadapan tataran realitas terhadap kekerasan di Indonesia khususnya di Masa Pra Kolonial. Pembahasan lebih lanjut akan memperlihatkan apakah kekerasan itu bersifat alamiah, dalam hal ini apakah masyarakat Indonesia (pribumi) secara alamiah memiliki budaya kekerasan atau karena faktor struktural, jadi kekerasan sangat dipengaruhi oleh situasi politik saat itu baik dipicu oleh pemimpin lokal (raja/tuan tanah) atau tekanan pemerintahan kolonial.

Membandingkan karakteristik, kondisi dan pelaku kekerasan dewasa ini dengan masa lalu dapat mengungkap pola dan perbedaan yang bisa membantu kita melihat mengapa dan bagaimana kekerasan terjadi. Sudah banyak ditulis

---

[19] Ibid., hal. 52 dan 58.

[20] Kenneth W.Grundy and Michael A. Weistein, *The Ideology of Violence* (Ohio: A.Bell&Howell Company, 1974) hal. 34.

kekerasan di masa Orde Baru, kekerasan di sekitar Gerakan 30 September 1965-1966, kekerasan pada masa revolusi dari 1945-1949, serta kekerasan pada zaman kekuasaan Belanda. Untuk mencari akan kekerasan, adalah perlu mengetahui kekerasan di Kepulauan Nusantara sebelum datangnya kekuasaan kolonial. Bagaimana kita bisa mengetahui kekerasan seperti apa yang terjadi pada masa itu?

Sophia Malkasian dalam tulisannya berjudul *Determined to Die? European Accounts of Violence in the Pre-colonial Indonesian Archipelago.*[21] mengungkapkan catatan-catatan pengelana, pedagang, misionaris, dan negarawan Eropa dari abad 16 hingga 19 untuk mengetahui masyarakat prakolonial di Kepulauan Nusantara. Walau diakui Malkasian, bukti-bukti yang tercatat terlihat miskin perspektif, misalnya terlalu terbatasi pandangan Eurosentris dan dalam banyak kasus terlalu dipengaruhi oleh agenda kolonial, untuk bisa benar-benar memahami karakteristik, kondisi dan pelaku kekerasan di kalangan masyarakat pribumi. Tetapi, catatan itu bisa memberikan cukup informasi untuk mengetahui bahwa kekerasan, yang seringkali brutal, terjadi di seluruh lapisan masyarakat seperti halnya dewasa ini. Meskipun ada kesulitan untuk memahami sifat kekerasan pada masa prakolonial. catatan-catatan orang Eropa itu menggambarkan kontinuitas aktifitas kekerasan dan tingkat brutalitasnya sepanjang abad-abad itu. Orang-orang Eropa itu menceritakan kekerasan yang dilakukan oleh kerajaan, bangsawan, suku-suku, penjahat, orang-orang biasa, dan pemilik budak.

Catatan-catatan pertama orang Eropa mengenai yang dulu disebut Kepulauan India ditulis oleh, atau berdasarkan pengalaman, penjelajah Portugis seperti Ferdinand Magellan (dituliskan oleh Antonio Pigafetta) dan Tome Pires pada awal abad ke-16. Yang lain ditulis menjelang akhir abad ke-16 oleh pedagang-pedagang Italia, Belanda, dan Inggris, penjelajah Spanyol dan Perancis, serta misionaris Jesuit.[22]

---

[21] Sophia Malkasian, "Determined to Die? European Accounts of Violence in the Pre-colonial Indonesian Archipelago" yang dipersiapkan untuk Kuliah *Historical Perspectives on Violence in Contemporary* Indonesia di Ohio Univesity, Fall 2002, http://www.cmdd.org

[22] Ibid., dikutip dari Donald Lach, *Southeast Asia in the Eyes of Europe: The Sixteenth Century* (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1965).

The Suma Oriental, karya Tome Pires, “.. selain menjadi catatan yang paling ekstensif mengenai Timur oleh orang Portugis, juga menjadi deskripsi orang Eropa pertama tentang Malaysia.[23] Tome Pires was “..adalah seorang farmasiwan dari Lisbon yang tinggal di Malaka pada 1512-1515, sesaat setelah penaklukan Malaka oleh Portugis pada 1511. Dia bertandang ke Jawa dan Sumatra, dan dengan semangat mengumpulkan informasi dari yang lain mengenai daerah Malay-Indonesia.[24] Rujukannya tentang kekerasan biasanya ringkas, sekadar menggambarkan fakta, dan menyatu dengan penggambarannya tentang penduduk secara umum, kerajaan-kerajaan serta perang.

Dalam bab tentang Jawa, Pires memperkenalkan kebiasaan amuk (running amuck), yang belakangan kita lihat banyak penulis Eropa menulis tentangnya:

> There are among the nations no men who are amocos like those in the Javanese nation. Amocos means men who are determined to die (to run amuck). Some of them do it when they are drunk, and these are the common people; but the noblemen are much in the habit of challenging each other to duels, and they kill each other over their quarrels; and this is the custom of the country. Some of them kill themselves on horseback, and some of them on foot, according to what they have decided.[25]

Menurut Sophia Malkasian dalanm hal ini, Pires tidak berusaha mencari tahu mengapa orang-orang itu bekeras untuk mati, dan dia hanya menggambarkan bentuk bunuh diri sebagai kebiasaan daerah-daerah itu. Apakah “rakyat biasa,” yang dia rujuk itu, adalah orang-orang tertindas? Apakah para bangsawan yang saling menantang untuk duel itu berkeras untuk mati atau mereka berkeras untuk membunuh? Apakah duel adalah salah satu bentuk amocos? Selain mabuk, kita tidak mengetahui kondisi apa yang menyebabkan amuk terjadi, juga kita tidak

---

[23] Ibid., dikutip dari *The Suma Oriental of Tome Pires: An Account of the East, from the Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512-1515 and The Book of Francisco Rodrigues*, vol. 1, trans. Portuguese MS and ed. Armando Cortesao (Glasgow, Great Britain: Univ. Press, 1944), xviii-xix.

[24] Ibid., dikutip dari Donald Lach, hal. 7.

[25] Ibid., dikutip dari Pires, hal. 176.

tahu motif-motif yang melakukannya. Lebih lanjut lagi, bagaimana amocos, seperti yang dia definisikan, ada bedanya dengan bunuh diri dalam tradisi dari mana Pires berasal?

Dua ratus tahun kemudian, pada 1755, pengelana Belanda John Splinter Stavorinus melanjutkan menjelajahi pulau-pulau di Nusantara. Stavorinus melaporkan tentang penghukuman pada penjahat, yang mengungkapkan kekejaman dan kebrutalan yang bisa dilakukan oleh penguasa-penguasa pribumi. Pertama, dia mengungkapkan prosedur hukuman tombak terhadap seorang budak yang membunuh tuannya di Makasar:

> The criminal was led, in the morning to the place of execution, being the grass plat, and laid upon his belly, being held by four men. The executioner then made a transverse incision at the lower part of the body, as far as the os sacrum; he then introduced the sharp point of the spike, which was about six feet long, and made of polished iron, into the wound, so that it passed between the back-bone and the skin. Two men drove it forcibly up, along the spine, while the executioner held the end, and gave it a proper direction, till it came out between the neck and shoulders. The lower end was then put into a wooden post, and riveted fast; and the sufferer was lifted up, thus impaled, and the post stuck in the ground. At the top of the post, about ten feet from the ground, there was a kind of little bench, upon which the body rested.
>
> He sat in this dreadful situation till death put an end to his torments, which fortunately happened the next day. There have been instances, at Batavia, of criminals who have remained alive for eight or more days, without any food or drink. One of the surgeons of the city assured me, that none of the parts immediately necessary to life are injured by impalement, which makes the punishment the more cruel and intolerable.[26]

Bentuk hukuman lain yang brutal, menurut Stavorinus, melibatkan penggunaan “binatang liar”:

---

[26] Ibid., dikutip dari John Splinter Stavorinus “Voyages to the East Indies”(London: Dawsons of Pall Mall?, 1798?]), 288-291, dikutip dalam John John Crawfurd, *History of the Indian Archipelago*, vol. 1 (1820; reprint, London: Frank Cass, 1967), 44-5.

> The emperors sometimes make criminals condemned to death fight with tigers. In such cases, the man is rubbed with borri, or turmeric, and has a yellow piece of cloth put around him, a kris is then given to him, and he is conducted to the field of combat.
>
> The tiger, who has, for a long time, been kept fasting, falls upon the man with the greatest fury, and generally strikes him down at once, with his paw, but if he be fortunate enough to avoid this, and to wound the animal, so that it quits him, the emperor then commands him to attack the tiger; and the man is generally the victim.[27]

Catatan berikutmya disampaikan oleh Thomas Stanford Raffles seorang Letnan Gubernur di Jawa pada masa kekuasaan Inggris pada 1811-1816. Dalam karya monumentalnya *History of Java* (1817) Raffles memiliki pandangan yang berbeda dibanding Pires maupun Stavorinus. Jika Pires melaporkan bahwa tidak ada orang yang lebih amocos ketimbang orang Jawa, Raffles menyatkan bahwa orng Jawa tidak memiliki sifat amuk. Selanjutnya, kekerasan yang terjadi adalah akibat dari "kehidupan di bawah pemerintah di mana keadilan jarang ditegakkan dengan sebenarnya dan tanpa pandang bulu."[28] Kutipan berikut ini meringkaskan bahasan Raffles tentang kekerasan:

> Vicinity and daily intercourse afford opportunities of conferring real assistance and acts of kindness: injustice and even violence may sometimes be committed against the inhabitants of other villages but very seldom by the inhabitants of the same village against each other.
>
> Though living under a government where justice was seldom administered with purity or impartiality, and where of course, we might expect to see the hand of private violence stretched out to punish private wrong, or a general spirit of retaliation and insidious cruelty prevailing, the Javans are, in a great degree, strangers to unrelenting hatred and bloodthirsty revenge.
>
> They are little liable to those fits and starts of anger, or those sudden explosions of fury, which appear among northern nations. To this remark have been brought forward as exceptions, those acts of vengeance, proceeding from an irresistible frenzy, called mucks, where the unhappy

---

[27] Ibid., dikutip dari Stavorinus, hal. 44-5.
[28] Ibid., dikutip dari Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, vol. 1 (1817; cetak ulang, dengan Pendahuluan oleh John Bastin, London: Oxford Univ. Press, 1965), hal. 254.

> sufferer aims at indiscriminate destruction, until he himself is killed like a wild beast, whom it is impossible to take alive. It is a mistake however to attribute these acts of desperation to the Javans.[29]

Dia melanjutkan dengan mengakui bahwa "amuck" memang terjadi di Jawa, tetapi "hal itu hanya dilakukan hampir seluruhnya terbatas oleh kelas budak":

> This phrenzy, as a crime against society, seems, if not to have originated under the Dutch, certainly at least to have been increased during their administration by the great severity of their punishments. For the slightest fault, a slave was punished with a severity which he dreaded as much as death. He often preferred to rush on death and vengeance.[30]

Sayangnya pembahasan Raffles tentang kekerasan amuk tidaklah memuaskan karena dia menimpakan itu pada bagaimana Belanda menghukum budak, meskipun, seperti yang sebenarnya diakuinya juga, *running amuck* juga terjadi sebelum bekuasanya Belanda. Belakangan dia pada dasarnya menimpakan pada Belanda sebagai penyebab terjadinya kejahatan-kejahatan di Jawa, dengan mengatakan bahwa "kejahatan yang kejam sangatlah jarang terjadi, dan pada intinya penyebabnya adalah kesalahan pemerintahan yang berkusa tatkala kejahatan itu terjadi."[31] Raffles juga berusaha membedakan persepsi Inggris dan Belanda terhadap Jawa, dengan mengutip seorang Belanda yang mukim di Jawa yang mengatakan bahwa sifat-sifat utama orang Jawa adalah "pendendam, bengis, tak taat pada atasan, meremehkan dan despotik terhadap orang di bawahnya, …cenderung merampok dan membunuh ketimbang bekerja, dan licik dalam melakukan perbuatan-perbuatan tak terpuji. Dengan kata lain, menurut Raffles, Belanda telah menganggap hal-hal yang seram terhadap orang Jawa, sedang Inggris melihat sebaliknya.[32]

Pada 1820, sesaat setelah Raffles menerbitkan sejarahnya tentang Jawa, John Crawfurd menerbitkan sebuah buku tentang Kepulauan India. Crawfurd adalah anggota ekspedisi Inggris yang menaklukkan Jawa pada 1811, dan

[29] Ibid., dikutip dari Raffles, hal., 247-250.
[30] Ibid., dikutip dari Raffles, hal. 250.
[31] Ibid.
[32] Ibid., dikutip dari Raffles, 254.

menempati beberapa posisi administratif pada pendudukan Inggris hingga 1816. Dia juga mengunjungi Bali dan Sulawesi untuk misi politik. Sama seperti Raffles, Crawfurd secara umum menulis yang baik-baik tentang sifat orang Jawa, tetapi berbeda dengan Raffles dia juga berpendapat bahwa orang Jawa memiliki semangat pendendam yang berbahaya, seperti halnya semua penduduk pribumi di Nusantara.

Adalah jiwa pendendam, digabung dengan pemerintahan yang buruk, menurut Crawfurd, yang menimbulkan kebiasaan amuck itu:

> Revenge, the vice of all barbarians, is the most prominent in the character of the Indian islanders. They can hardly forgive an injury, and are capable of harbouring the longest and the deepest rooted resentment. In a state of society where there is no regular administration of justice, but where the security of every man's honour, life, and property, depends in no small degree upon his own arm, we may almost hesitate whether to pronounce the passion of revenge a virtue or a vice. Without it, at all events, society could not exist.
>
> The spirit of revenge, with an impatience of restraint, and a repugnance to submit to insult, more or less felt by all the Indian islanders, give rise to those acts of desperate excess which are well known in Europe under the name of mucks. Amuck means generally an act of desperation, in which the individual or individuals devote their lives, with few or no chances of success, for the gratification of their revenge.[33]

Jika Raffles menjelaskan bahwa amuck adalah reaksi terhadap tindakan Belanda, Crawfurd mengatakan bahwa itu adalah sifat inheren kaum pribumi. Crawfurd menjelaskan bahwa sifat ini terpantik oleh ketidakadilan dan pemerintahan yang buruk, tetapi dia tidak menyebut Belanda..

Crawfurd membahas secara panjang lebar dalam bab tentang "kebiasaan dan karakter orang Hindia" mengenai pemerintahan yang buruk ini dan kurang beradabnya penduduk pribumi. Dalam menjelaskan apa yang dia sebut "keburukan penduduk kepulauan Hindia," pada dasarnya dia memberikan alasan untuk kekuasaan kolonial, dan karenanya memenuhi sebuah agenda politik.

[33] Ibid., dikutip dari John Crawfurd, *History of the Indian Archipelago: Containing an Account of the Manners, Arts, Languages, Religions, Institutions, and Commerce of Its Inhabitants*, vol. 1 (1820; reprint, London: Frank Cass, 1967), hal. 65-67.

Misalnya, diantara keburukan itu, menurut Crawfurd, adalah “pelecehan terhadap kehidupan manusia”:

> They live in a state of turbulence and anarchy; the empire of law is next to nothing; death is familiar to the people, and has few terrors for them, and the great body are in such a state of degradation, that they neither value the lives of each other, nor are those lives likely to be valued by their chiefs, who despise them in every thing else. The exercise of the right of private revenge, and the law which acknowledges it, demand life for life, but both accept a pecuniary commutation; so that every man’s life has its price, and that, too, not a very high one. Murders and assassinations are frequent, therefore, in every country of the Archipelago.[34]

Melalui catatan-catatan yang dikemukakan oleh Tome Pires, John Stavorinus, Thomas Raffles, John Crawfurd, sangat berdasar pada titik pandang Eurosentris dan tidak cukup menjelaskan tujuan dan konteks kebiasaan kekerasan di antara penduduk pribumi. Tatkala mereka mencoba melakukan penjelasan, itu dilakukan untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan politik mereka, yang tentu saja mengancam objektivtas dan akurasi catatan-catatan mereka.

Meskipun begitu, di bawah interpretasi-interpretasi yang penuh bias itu adalah kekerasan itu sendiri. Mengetahui apa yang terjadi, meskipun sulit untuk mengatakan mengapa dan bagaimana terjadi, sudah menolong untuk menyelidiki akar-akar kekerasan di Indonesia. Misalnya, kita dapat melihat bahwa pola kekerasan tertentu yang terjadi dewasa ini, seperti *running amuck* dan main hakim sendiri, adalah bukan kejadian khas abad ke-20.

D. Penutup

Dalam tataran teoritis kekerasan dapat dipahami dalam dua faktor utama. Pertama adalah faktor inheren atas kemunculan kekerasan. Faktor inheren ini melihat bahwa kekerasan dilakukan oleh individu yang relatif otonom dalam melakukan tindakan kekerasan. Sebaliknya kekerasan dapat pula dipahami karena faktor-faktor struktural. Artinya kekerasan dipahami sebagai hasil proses hubungan-hubungan sosial atau struktur di mana para pelaku berada. Jadi tindakan individu dianggap tidak lebih dari artefak atau produk struktur.

[34] Ibid., dikutip dari Crawfurd, hal. 70-71

Kekerasan pada era pra kolonial seperti yang tertuang dalam catatan-catatan sejarah yang dibuat oleh orang-orang Eropa semakin memberikan penegasan atas faktor yang menyebabkan kekerasan. Bagi Pires misalnya, bahwa pada dasarnya secara inheren masyarakat pribumi di Indonesia memiliki potensi dan aktus akan kekerasan. Sebaliknya Raffles berpendapat sebaliknya, bahwa kekerasan yang ada di masyarakat pribumi lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural yakni tekanan dari pemerintahan kolonial. Namun ada juga yang berpendapat bahwa kekerasan di masyarakat Hindia disamping karena faktor inheren juga karena faktor struktural, seperti yang dikemukakan oleh Crawfurd.

Untuk itu dalam upaya mencari akar kekerasan di Indonesia kontemporer, kita harus memperhitungkan bahwa banyak jenis kekerasan yang terjadi sekarang juga telah tejadi selama beberapa abad. Catatan-catatan orang Eropa menunjukkan bahwa kita tidak bisa semata-mata mengatributkan kekerasan dalam Indonesia kontemporer pada kondisi atau struktur politik yang ada dewasa ini.

Daftar Pustaka

Arendt, Hannah, *On Violence*,London: Allen Lane the Penguin, 1970.

Asfar, Muhammad, "Kekerasan Politik dan Demokrasi: Analisis terhadap Kekerasan Politik di Seputar Pemilu 1997", dalam *Prisma* Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial, No.1 1998, LP3ES, Jakarta.

Audi, Robert, "The Justification of Violence" dalam *Philosophy for a New Generation*. A.K. Bierman dan J. Gould, New York, 1970.

Charny, Israel W. (ed), *Strategies Against Violence: Design For Nonviolen Change*,Boulder, Colorado: Westview Press, Inc., 1978.

Garver Newton, "What violence is"?, dalam: *Philosophy for a New Generation*, A.K. Bierman dan J. Gould, New York, 1970.

Grundy, Kenneth W. dan Michael A. Weistein, *The Ideology of Violence* Ohio: A.Bell&Howell Company, 1974.

Malkasian, Sophia, "Determined to Die? European Accounts of Violence in the Pre-colonial Indonesian Archipelago" yang dipersiapkan untuk Kuliah *Historical Perspectives on Violence in Contemporary* Indonesia di Ohio Univesity, Fall 2002, http://www.cmdd.org

Mills, C.Wright, *The Power Elite* ,New York:1956.

Surbakti, Ramlan, Pemilihan pada Pemilu 1992, antara Kendala dan Peluang" makalah disampaikan pada Seminar Nasional IX AIPI, Surabaya, 6-8 Agustus 1992.

Suryakusuma, Julia L., "Budaya Kekerasan, atau Budaya yang Menghasilkan Kekerasan" dalam *Kompas*, 1 Mei 1998.

Suseno, Franz Magnis, Etika Politik, Gramedia, Jakarta, 1987.

Sutrisno, Mudji, "Kekerasan Struktural", dalam Kompas, 8 Juli 1997.

____________,"Kekerasan:antara Dibenci dan Dipuja",dalam *Kompas*, 18 Agustus 1996.